



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember, 2019

DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5455>

LAZDAI LAMPUNG SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Suhandi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

subandi@radenintan.ac.id

Abstract

The existence of religious institutions is a religious social institution that plays an important role in fostering the religious life of the community. The role is evident in the activities of providing education both formal and non-formal, as well as the activeness of religious institutions in charitable activities and fostering religious harmony. The community still feels the great benefits from the role of religious institutions in the formation of religious communities. Because the main task of religious institutions is to foster society with religious values; starting from the pattern of behavior, thoughts, patterns of life, then this will be closely related to the system of community development. Likewise with community development activities; it also seeks to empower people against aspects of life that are felt to be quite weak. The Amil Zakat Institution of the Charitable Area (LAZDAI) in Lampung is engaged in collecting and empowering zakat, infaq, shodakoh, waqf, and fidyah of donors. After conducting research using a qualitative approach, this institution has succeeded in empowering the Islamic community. Zakat funds are not only consumptive in nature, but are also empowered as mustahik business capital funds, scholarship funds, health funds, disaster victims' relief funds, and other social funds. While the inhibiting factors include: the limitations of human resources (HR) which resulted in socialization and information are still not affordable to all corners of Lampung, limited facilities and pre-supporting facilities such as vehicles, limited information facilities, and office facilities that are still minimal.

Abstrak

Keberadaan lembaga keagamaan merupakan lembaga sosial keagamaan yang memegang peranan penting dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Peranan tersebut tampak dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, serta keaktifan lembaga keagamaan dalam kegiatan amal dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Masyarakat masih merasakan manfaatnya yang besar dari peran lembaga keagamaan dalam pembinaan keagamaan masyarakat. Karena yang menjadi tugas pokok dari Lembaga keagamaan adalah membina masyarakat dengan nilai-nilai agama; mulai dari pola tingkah laku, pemikiran, pola kehidupan, maka hal ini akan sangat terkait dengan sistem pengembangan masyarakat. Demikian halnya dengan kegiatan pengembangan masyarakat; juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan yang dirasakan cukup lemah. Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) di wilayah Lampung bergerak dalam penghimpunan dan pemberdayaan zakat, infak, shodakoh, wakaf, dan fidyah para donatur. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, lembaga ini telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat Islam. Dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi juga diberdayakan sebagai dana modal usaha para mustahik, dana beasiswa, dana kesehatan, dana bantuan korban bencana, dan dana sosial lainnya. Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan sosialisasi dan informasi masih belum dapat terjangkau ke seluruh pelosok Lampung, keterbatasan Sarana dan pra sarana penunjang seperti kendaraan, sarana informasi yang masih terbatas, dan sarana perkantoran yang masih minim.

Keywords: *Religious Institutions, Community Empowerment, LAZDAI Lampung*

A. Pendahuluan

Membicarakan peranan agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentu memiliki hubungan yang sangat erat. Pertama, Pengaruh dari cita-cita agama dan etika agama dalam kehidupan individu dari kelas sosial dan grup sosial, perseorangan dan kolektivitas, dan mencakup kebiasaan dan cara semua unsur asing agama diwarnainya. Kedua, Menyangkut organisasi dan fungsi lembaga agama sehingga agama dan masyarakat itu berwujud kolektivitas ekspresi nilai-nilai kemanusiaan, yang mempunyai seperangkat arti mencakup perilaku sebagai pegangan individu dengan kepercayaan dan taat kepada agamanya. Agama

sebagai suatu sistem mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham, ritual, serta umat atau kesatuan sosial yang terkait agamanya. Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya, kemudian terstrukturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku umum, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, sosial, berbangsa, bernegara, dan sebagainya.

Lahirnya lembaga-lembaga keagamaan dalam kontes kehidupan sosial dimaksudkan untuk menghadirkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam kehidupan masyarakat. Agama tidak hanya sebagai doktrin yang hampa, melainkan dapat dirasakan kehadirannya yang dapat berkontribusi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Sehingga bermunculan berbagai institusi atau lembaga keagamaan dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan landasan pemikiran yang dikembangkan; seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) mulai dari tingkat hingga tingkat Nasional, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan lain sebagainya. Tentu saja sebagai lembaga keagamaan, pergerakannya lahir dari spirit ajaran Islam, yang berorientasi mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan manusia secara umum dan secara khusus bagi umat muslim.

Selanjutnya yang juga menjadi salah satu lembaga keagamaan LAZDAI; adalah Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani di wilayah Lampung yang bergerak dalam penghimpunan dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fidyah para donatur. Sejarah kegiatan lembaga ini dimulai sejak tahun 1994, ketika terjadinya bencana alam nasional di kota Liwa kabupaten Lampung Barat. pada saat itu berdirilah sebuah institusi yang berbentuk yayasan; yakni yayasan Baitul Maal Lampung. seiring dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka di bawah naungan Yayasan Amal Insani dikukuhkanlah Lembaga Amil Zakat Resmi dengan legalitas :

1. Badan hukum yayasan: Akte Notaris Imran Ma'ruf nomor 9 tanggal 29 Oktober 2001.

2. Keputusan Gubernur Lampung nomor: G/224/B.VII/HK/2002 tanggal 12 Juli 2002.¹

Dalam artikel ini akan dilakukan studi tentang peran lembaga keagamaan; dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (SAZDAI) di wilayah Bandar Lampung. Lembaga ini bergerak dalam penghimpunan dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fidyah para donatur. Sehingga akan diketahui bagaimana peran lembaga ini dalam memberdayakan potensi umat, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan pengembangan kepribadian.

B. Pembahasan

1. Lembaga Keagamaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Secara sosiologis lembaga keagamaan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna untuk mencapai kebutuhan dasar yang berkenaan dengan dunia supranatural empiris. Lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan adalah salah satu unsur yang mempunyai tanggung jawab dalam menunjang keberhasilan di bidang keagamaan. Keberadaan lembaga keagamaan merupakan lembaga sosial keagamaan yang memegang peranan penting dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Peranan tersebut tampak dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, serta keaktifan lembaga keagamaan dalam kegiatan amal dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Masyarakat masih merasakan manfaatnya yang besar dari peran lembaga keagamaan dalam pembinaan keagamaan masyarakat. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.²

Lembaga-lembaga keagamaan ini dapat pula menjadi pusat kehidupan masyarakat, seperti pernah terjadi di Eropa dan di Arab

¹ LAZDAI Lampung, Brosure Launching Penyaluran Beasiswa Pro Cermat, Tanpa Tahun.

² Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawal Pers, 1985), h. 184.

dalam zaman keemasan agama Nasrani dan Islam. Umpamanya kita lihat adanya undang–undang agama atau gereja (cannons atau kanun), pusat-pusat pendidikan yang ada dalam tangan lembaga agama, juga adanya kegiatan di bidang kesenian dan perekonomian.³ Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap masyarakat ada tiga aspek yang perlu dipelajari, yaitu kebudayaan, sistem sosial, dan kepribadian. Ketiga aspek itu merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terpadu yang pengaruhnya dapat diamati pada perilaku manusia. Timbul pertanyaan sejauh mana fungsi lembaga agama dalam memelihara sistem, apakah lembaga agama terhadap kebudayaan sebagai suatu sistem, dan sejauh mana fungsi agama dalam mempertahankan keseimbangan pribadi. Dan hal ini akan terkait dengan peran lembaga keagamaan dalam meberdayakan potensi umat.

Sementara itu jika dilihat dari fungsinya, maka lembaga agama memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. memberikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya.
2. Institusi agama sering kali memberikan dasar bagi perilaku yang ajeg (berpola) dalam masyarakat.
3. Lembaga agama memberikan dasar pembentukan perilaku yang berpola.
4. Lembaga agama dapat menyatukan nilai dan etika menjadi prinsip-prinsip dan menyediakan pedoman untuk mengambil kebijakan sosial.
5. Memberikan bantuan terhadap pencarian identitas moral
6. Memberikan penafsiran untuk membantu menjelaskan keadaan lingkungan alam maupun social.
7. Peningkatan kadar keramahan bergaul, kohensi sosial, dan solidaritas kelompok.⁴

Karena yang menjadi tugas pokok dari Lembaga keagamaan adalah membina masyarakat dengan nilai-nilai agama; mulai dari pola tingkah laku, pemikiran, pola kehidupan, maka hal ini akan sangat

³ Soekandar Wiriaatmadja, *Pokok – Pokok Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: CV. Yasaguna, 1972), h. 104 – 106.

⁴ Taufiq Rohman Dhohiri, et. El., *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhitira, 2007), h. 69

terkait dengan sistem pengembangan masyarakat. Demikian halnya dengan kegiatan pengembangan masyarakat; juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan yang dirasakan cukup lemah. Sesuai dengan pendapat Imang Mansur Burhan bahwa pengembangan masyarakat Islam menurut pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁵ Demikian juga Amrullah Ahmad mengemukakan bahwa Pengembangan Masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.⁶

Hal di atas menunjukkan bahwa tugas lembaga keagamaan adalah juga memberdayakan masyarakat. Sehingga dalam konteks ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain :

1. Pendekatan Pemberdayaan pada Matra Rohaniah.
2. Pendekatan Pemberdayaan pada Matra Intelektual
3. Pendekatan Pemberdayaan pada Matra Ekonomi⁷

Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Pemberdayaan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual. Konsepsi pemberdayaan dalam konteks Pengembangan Masyarakat Islam agaknya cukup relevan dalam hal ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini adalah sebagai berikut :

⁵ Nanih Mahendrawati, Agus Efendi, *Pengembangan Masyarakat Islam...*, h. 42.

⁶ *Ibid.*, h. 44

⁷ *Ibid.*, h. 54

Pertama, pada intinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu, tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tamal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (fresh money) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”. Padahal, dalam Islam, meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari pada memberi.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa pembangunan adalah *social learning*.⁸ Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif dimana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

Keempat, pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu

⁸ Soedjatmoko, *Sosial Energy as a Development Resource dalam David C. Korten (ed.), Community Management Asian*, h. 20

program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang, sering kali *people empowerment* diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari *nrimo ing pandum* menjadi aktif-partisipatif.⁹

Sesuai dengan sifatnya yang sangat elastis, maka istilah pemberdayaan dapat juga disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau dapat juga disamakan dengan istilah pembangunan (*development*). Sedangkan makna dari pemberdayaan sendiri adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.¹⁰ Selanjutnya pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka pengembangan atau pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu yang dipahami sebagai proses pembangunan masyarakat dalam berbagai sektor yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus

⁹ Dirangkum dan dianalisis dari Donald W. Litereel, *The Theori and Practice of Community Development. A Guide for Practitioners*, seperti disadur oleh M. Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktik Pengembangan Masyarakat*, (Surabaya. Usaha Nasional, 1986), h. 12-15

¹⁰ Abdi Zulkarnaen Sitepu, *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, dalam Jurnal "MENARA INTAN", P2M IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 23 Nomor 2 Desember 2005, h.. 72.

tumbuh dan berkembang dalam pola dan dinamika kehidupan masyarakat.

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Pemberdayaan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat dalam batasan-batasan minimum manusia yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual.

Ada beberapa pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Abdi Zulkarnaen Sitepu¹¹ :

a. Pendekatan Pertumbuhan (*Growth Approach*).

Pendekatan ini menekankan pada strategi industrialisasi dan substitusi impor dengan investasi dan padat modal. Sehingga banyak memiliki resiko dan efek yang negatif terhadap pertumbuhan masyarakat. Misalnya meningkatnya angka pengangguran yang dapat menyebabkan bertambahnya angka kejahatan dan kriminalitas. selain itu pendekatan ini juga akan mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan politik.

b. Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan (*Resdistribution of Growth Approach*)

Pendekatan ini diterapkan pada tahun 1973 yang diperkenalkan oleh Adelman dan Morris. Pendekatan ini menggambarkan indikator-indikator pembangunan dalam tiga indikator: indikator sosial budaya, indikator politik, dan indikator ekonomi. secara teoritis pendekatan ini mudah difahami, tetapi dalam penerapannya hal ini sangat sulit, karena masalah kemiskinan dalam perwujudan yang nyata bukanlah sekedar masalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada kelompok masyarakat tertentu.

¹¹ *Ibid.* h. 73-74.

c. Paradigma Ketergantungan (*Dependence Paradigma*)

Teori ini dimunculkan pada tahun 1970-an oleh Cardoso. Menurutnya untuk menggerakkan industri-industri membutuhkan komponen-komponen dari luar negeri dan hal ini menimbulkan ketergantungan dari segi teknologi dan kapital. Dan distribusi pendapatan di dunia ketiga menimbulkan pembatasan akan permintaan terhadap barang hasil industri yang hanya mampu dinikmati sekelompok kecil kaum elite.

d. Pendekatan Kebutuhan Pokok (*The Basic Needs Approach*)

Pendekatan ini diperkenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina. Pendekatan ini beransumsi bahwa kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika kita masih berada di bawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik. oleh karena itu ada tiga ssaran yang dikembangkan secara bersamaan yaitu: membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

e. Pendekatan Kemandirian (*The Self-Reliance Approach*)

Pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai upaya negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara-negara industri.

Kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh beberapa pendekatan di atas dapat diatasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan setrategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal; melalui keanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau pada pemberdayaan (*empowerment*) yang memandang inisiatif – kreatif dari rakyat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kesejahteraan material dan spiritual senagai tujuan yang dicapai dalam proses pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada rakyat ini merupakan antitesis dari pembangunan yang berorientasi pada produksi dan strategi pembangunan ekonomi yang

memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama dari pada kebutuhan rakyat.

Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan. Pertama, Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset materiil guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer. Kedua, Kecenderungan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sasaran pembangunan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat adalah individu, keluarga dan komunitas memungkinkan untuk melakukan tindakan atau aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya. oleh karena itu penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang bersifat partisipatif yaitu terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat (*Stake Holders*).¹²

Dalam pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku (*subject*) pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif, karena gerakan pemberdayaan masyarakat mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Partisipasi warga dalam melaksanakan pembangunan harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama, dan cita-cita bersama. Dengan pola ini akan menumbuh-kembangkan

¹² *Ibid.*

semangat untuk selalu bekerja saling bahu membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi dalam hidup bersama.

4. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan struktur dalam kehidupan masyarakat; yakni individu, keluarga dan masyarakat. Maka Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi dalam tiga tahapan¹³ :

a. Tahapan Individu

Kualitas manusia dalam masyarakat pada dasarnya saling terkait, dalam matra sebagai anggota keluarga, kelompok dari warga negara, manusia dapat ditentukan oleh kelompok interaksi dengan orang lain penciptaan kualitas perorangan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan hal-hal dalam masyarakat yang dapat mengatur, mempengaruhi, menunjang serta membentuk pola hidupnya. Kualitas bermasyarakat merupakan ciri kualitas manusia yang penting. Sebaliknya kualitas ini tidak pula dapat dibangun tanpa kualitas perorangan.

Ada tiga dimensi dalam pengembangan dan pemberdayaan individu untuk mencapai kualitas yang baik, yaitu :

- Dimensi kepribadian sebagai manusia. Yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat.
- Dimensi produktifitas. Yaitu yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
- Dimensi kreatifitas. Yaitu yang menyangkut kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.¹⁴

¹³ Supriyati Istiqomah, *Pemberdayaan Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*, dalam Jurnal "KOMUNITAS", Vol. 26 No. 1 Juni 2008, P2M IAIN Raden Intan Lampung, h. 50-53.

¹⁴ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h. 60.

Pemberdayaan secara individu dapat dikembangkan dengan cara yang komprehensif dan aplikatif. Secara konkrit, pemberdayaan individu pada matra rohaniah (afektif) dapat berupa bimbingan, pengajian, khotbah, pendidikan dan pengajaran baik formal maupun informal yang tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengalaman. Arahan dan bimbingan secara individual kepada seseorang untuk menjalankan semua yang menjadi kewajiban pribadinya seperti shalat, puasa, zakat, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya; akan menumbuhkan sikap qalbu ke arah yang lebih baik sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Sebagai contoh, seseorang yang biasa menjalankan shalat akan memiliki keseimbangan baik pada aspek kesehatan, kejiwaan ataupun kemasyarakatan.¹⁵ Pemberdayaan pada matra rohaniah sangat penting untuk dikembangkan pada tatanan individu, karena pemberdayaan pada matra rohaniah ini sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya, baik disiplin, intelektual, etos kerja, motivasi dan prestasi.

b. Pemberdayaan Keluarga

Keluarga merupakan suatu bentuk masyarakat terkecil, tetapi terpenting dalam hidup seseorang. Keluarga adalah jiwa masyarakat dan merupakan tulang punggungnya. Keluarga juga merupakan umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Apabila pembinaan individu-individu dalam keluarga diarahkan kepada pembinaan dan pemberdayaan yang baik dengan memiliki kecerdasan rohaniah dan keverdasan intelektualitas, maka keluarga tersebut akan dapat mencapai keluarga yang mandiri sejahtera dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan.

Adapun pemberdayaan keluarga pada matra intelektual adalah dalam bentuk bimbingan dan pengajaran secara informal dalam keluarga yang dapat berbentuk pengetahuan secara kognitif ataupun dalam bentuk keterampilan (*life skill*). Jika anggota keluarga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan baik didapat melalui pendidikan formal, non formal maupun informal (pengajaran privat) dan lain sebagainya, maka keluarga tersebut akan memiliki tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja yang tinggi.

¹⁵ *Ibid.*

perlu adanya usaha peningkatan skill bagi anggota keluarga dan keterampilan berwira usaha. dalam bentuk pemberian modal usaha (dalam bentuk *mudharabah*), penyaluran zakat, dan berbagai bentuk bantuan modal usaha lainnya. Pemberdayaan rohaniah dan intelektual pada tingkat keluarga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi. ini adalah sebagai kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup keluarga menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

c. Pemberdayaan Melalui Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pememanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien dilihat dari (a) aspek masukan atau *ni-put* (SDM), dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi. (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan). (c) dari aspek keluaran atau *out-put* (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisien).¹⁶

Masyarakat pada dasarnya terdiri dari individu-individu, oleh karena itu jika pemberdayaan secara individu sudah berjalan dengan baik, maka secara rohaniah tidak langsung akan berpengaruh terhadap pemberdayaan pada tatanan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada tatanan rohaniah memerlukan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen yang ada, baik melalui pendidikan formal, non formal ataupun informal yang berorientasi kepada pemberdayaan total rohaniah Islam. Melalui dakwah Islam yang sistem moralitasnya dibangun di atas nilai-nilai agama. Melalui pendidikan formal pemberdayaan ini dapat berupa penanaman nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang tinggi yang mengacu kepada desain kurikulum yang diaplikasikan terhadap kegiatan pendidikan menuju hasil pendidikan yang optimal, tatanan non formal dapat berupa pemberdayaan kelompok-kelompok pengajian dan pengkajian keagamaan. Sedangkan pada tataran informal dapat berbentuk bimbingan dan arahan spiritual dalam keluarga, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rohaniah masyarakat.¹⁷

¹⁶ Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), h. 23.

¹⁷ Suprihati Istiqomah, *Pemberdayaan Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*, h. 53.

Pemberdayaan masyarakat pada matra intelektual pada tatanan masyarakat, dapat diselaraskan dengan pemberdayaan rohaniah, yang melibatkan berbagai komponen, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen terkait lainnya dan juga melibatkan media masa baik cetak maupun elektronik dengan materi pemahaman bidang kognitif masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*sosial empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan skala prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya) dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya dana sumber dana keuangan dan manajemen keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat dalam pembangunan, atau dapat disebut sebagai "partisipasai masyarakat". untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (*capable and acceptable local leadership*).

C. LAZDAI Lampung

a. Visi dan Misi

Sebagaimana lazimnya sebagai sebuah organisasi yang telah mapan, maka LAZDAI jugai memiliki Visi kelembagaan yang visioner yang mampu membawa lembaga ini pada perkembangannya yang sangat signifikan dalam rangka mengemban amanat umat. adapun visi LASDAI Bandar Lampung adalah : "Menjadi Lembaga Amal Zakat yang amanah dan profesional aerta terdepan dalam

pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat, infak dan sedekah.” sedangkan Misinya adalah : ”Menjadi lembaga Amil zakat yang profesional dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, menolong masyarakat lemah untuk mandiri melalui program pemberdayaan zakat.”¹⁸

b. Tujuan Dan Sasaran

LAZDAI sebagai lembaga amil zakat memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1). Rekrutmen dana zakat yang ada di masyarakat; yang selama ini kurang menjadi perhatian masyarakat secara khusus.
- 2). Memberdayakan potensi dana zakat yang sangat besar agar dapat dikembangkan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 3). Melakukan pengelolaan dana zakat secara profesional agar dapat dinikmati sesuai dengan tuntutan syari’at.
- 4). Menyadarkan masyarakat akan kewajiban zakat.

Sedangkan sasaran dari lembaga ini adalah merealisasikan kepedulian sosial terhadap kaum muslimin yang tarap kehidupannya masih di bawah garis kemiskinan (dhu’afa). Sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat miskin (mustahik). Mengacu pada Yayasan Amal Insani, core program LAZDAI adalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan untuk orang miskin. Core program tersebut diterjemahkan dengan semangat Bersih Hati Peduli Sesama.

c. Program Kerja

Sebagai sebuah Lembaga Amal Zakat, program-program LAZDAI secara garis besar dibagi menjadi dua :

- 1). Program layanan Ziswaf.

Layanan Ziswaf sebagai fundraising tools dikembangkan dalam berbagai fitur untuk memudahkan muzakki dan donatur (sedekah, infaq, dana kemanusiaan, dan donasi non zakat lainnya)

¹⁸ *Ibid.*

untuk menunaikan ziswaf serta donasi. Fitur-fitur layanan ziswaf itu antara lain :

a. Zakat Tunai

Dilayani langsung di kantor LAZDAI dan unit-unit pengumpul zakat oleh para amil yang insya Allah menjamin penunaian zakat anda sesuai dengan syari'ah.

b. Zakat Otomat

Debet langsung dari rekening muzakki sesuai perhitungan nisab.

c. Transfer via Bank

Zakat ditansfer ke rekening LAZDAI disertai dengan niat berzakat. diharapkan muzakki melakukan konfirmasi ke LAZDAI sekaligus penunaian akad.

d. Zakat Kolektif

Zakat dikumpulkan pada collector zakat LAZDAI di lingkungan anda.

e. Jemput Zakat

Layanan jemput zakat oleh amil untuk muzakki yang sibuk atau tidak sempat datang langsung ke kantor LAZDAI.¹⁹

2). Sistem Manajemen Zakat

a. Sosialisasi Zakat

Sosialisasi zakat dilakukan dengan tiga macam :

- Presentasi

Pola ini dilakukan baik di instansi pemerintah maupun di swasta; dengan menyampaikan program dan sistem manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan LAZDAI. Sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap dan profesionalisme pengelolaan zakat yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara menejerial maupun secara syari'ah.

- Pembinaan Resmi

¹⁹ LAZDAI CENTRE, The Company Profile, Tanpa Tahun.

Pola ini dilakukan dengan melakukan binaan kelompok muzakki; dengan melakukan pengajian, kajian-kajian khusus, dan dakwah/ tausiyah dengan melibatkan beberapa orang da'i.

- Penyebaran Brosur dan Majalah

Pola ini dilakukan dengan menyampaikan brosur LAZDAI yang berisi tentang informasi Visi dan misi, program, dan kelembagaan, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan LAZDAI. dan informasi lainnya yang terkait dengan motivasi-motivasi kepada umat agar dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.

b. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

Zakat dihimpun dengan secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan zakat secara langsung dilakukan dengan jemput bola; dari kantor LAZDAI mengutus staf terkait untuk mengambil zakat pada orang, kantor, atau instansi yang sebelumnya sudah melakukan kontak untuk pengambilan dana zakat. Sedangkan penghimpunan zakat secara tidak langsung adalah pengumpulan dana zakat yang terhimpun di rekening-rekening bank yang telah dipublikasikan pada brosur-brosur LAZDAI.

Langkah selanjutnya sebagai bagian dari pemberdayaan zakat adalah pengumpulan atau penghimpunan zakat. Pengumpulan zakat merupakan upaya amil zakat menyatukan harta zakat dari muzakki. Sedangkan pemberdayaan pengumpulan zakat maksudnya adalah upaya untuk memaksimalkan hasil pengumpulan harta zakat dari muzakki. Jika selama ini dilakukan secara sukarela, maka dalam konsep pemberdayaan zakat pengumpulan zakat didasarkan kepada prinsi-prinsip pengumpulan zakat yang sesuai dengan petunjuk syar'i dan dilakukan secara profesional. Dalam pengumpulan zakat LAZDAI menganut lima model pengumpulan dana zakat melalui program layanan Ziswaf. Layanan Ziswaf sebagai *fundraising tools* dikembangkan dalam berbagai fitur untuk memudahkan muzakki dan donatur (sedekah, infaq, dana kemanusiaan, dan donasi non zakat lainnya) untuk menunaikan ziswaf serta donasi. Fitur-fitur layanan ziswaf itu antara lain :

1. Zakat Tunai

Dilayani langsung di kantor LAZDAI dan unit-unit pengumpul zakat oleh para amil yang insya Allah menjamin penunaian zakat anda sesuai dengan syari'ah.

2. Zakat Otomat

Debet langsung dari rekening muzakki sesuai perhitungan nisab.

3. Transfer via Bank

Zakat ditansfer ke rekening LAZDAI disertai dengan niat berzakat. diharapkan muzakki melakukan konfirmasi ke LAZDAI sekaligus penunaian akad.

4. Zakat Kolektif

Zakat dikumpulkan pada collector zakat LAZDAI di lingkungan anda.

5. Jemput Zakat

Layanan jemput zakat oleh amil untuk muzakki yang sibuk atau tidak sempat datang langsung ke kantor LAZDAI.

Pengumpulan zakat yang bersifat pro-aktif dapat tercapai apabila didukung oleh profesionalitas dan manajemen yang baik. Karena itu, LAZDAI dalam pemberdayaan pengumpulan zakat dilakukan dengan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan menggunakan via rekening bank dan via internet. Tentu saja dengan tidak mengabaikan aspek-aspek manajemen dan syari'. Dengan demikian, secara umum penghimpunan zakat pada LAZDAI dihimpun dengan dua cara secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan zakat secara langsung dilakukan dengan jemput bola; dari kantor LAZDAI mengutus staf terkait untuk mengambil zakat pada orang, kantor, atau instansi yang sebelumnya sudah melakukan kontak untuk pengambilan dana zakat. Sedangkan penghimpunan zakat secara tidak langsung adalah pengumpulan dana zakat yang terhimpun di rekening-rekening bank yang telah dipublikasikan pada brosur-brosur LAZDAI.

Aspek perencanaan misalnya mencakup sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya. Perencanaan ini dilakukan karena pengumpulan zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan zakat masyarakat. Akan tetapi bagaimana proses itu dapat dilakukan secara cepat tepat dan efisien, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah rencanakan. Sedangkan aspek pengawasan mencakup aspek pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan dan metode dan sebagainya. Dan aspek evaluasi yang mencakup segala aktifitas yang dilakukan dalam sosialisasi, pengumpulan, pemberdayaan, dan pendistribusiab dana zakat keapad para mustahik.

Sedangkan Sistem pendistribuisian dana zakat disalurkan kepada para fakir miskin dan para dhu'afa baik secara konsumtif maupun dengan cara pendayagunaan. secara konsumtif LAZDAI menyalurkan dana zakat dalam berbagai bentuk, antara lain :

- Pemberian uang tunai uang tunai kepada fakir miskin
- Bantuan kepada musyafir
- Ibnu sabil
- Gharimin
- Bantuan seragam sekolah
- Santunan musibah
- Tali kasih guru ngaji
- Bantuan renovasi rumah
- Bantuan biaya nikah
- Perbaikan talut
- Bantuan mu'allaf
- Operasional penyaluran sembako
- Bantuan kepada sekolah
- Bantuan kepada pesantren
- Bantuan kepada Beasiswa
- Bantuan Majelis Ta'lim

Sedangkan penyaluran zakat tak langsung dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain :

- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan

- Bantuan modal dhu'afa²⁰
- Berikut ini akan diampilkkan data penyaluran dana ZIS oleh LAZDAI untuk wilayah Lampung Tengah :

No	Kegiatan Penyaluran	Jumlah
1.	Anjongsana dhu'afa sakit	7.534.000,-
2.	Musyafir	100.000,-
3.	Renovasi rumah dhu'afa	1.800.000,-
4.	Ghorimin	800.000,-
5.	Bantuan modal dhu'afa	700.000,-
6.	Bantuan biaya nikah	500.000,-
7.	Bhakti sosial	19.000.000,-
8.	Penyaluran aqiqah	730.000,-
9.	Perbaikan talut	400.000,-
10.	Bakti sosial	21.575.000,-
11.	Bantuan perbaikan rumah longsor	500.000,-
12.	Ibnu sabil	150.000,-
13.	Bantuan seragam sekolah	390.000,-
14.	Penyaluran 700 paket sembako	35.000.000,-
15.	Operasional penyaluran sembako	3.500.000,-
16.	Bantuan kegiatan sosial	10.000.000,-
17.	Bhakti sosial	13.163.000,-
18.	Penyaluran aqiqah untuk dhu'afa	6.560.000,-
19.	Bantuan dhu'afa	800.000,-
20.	Bantuan mu'allaf	200.000,-
	J u m l a h	123.411.000,-

Data: Majalah LAZDAI "AMAL INSANI, Edisi 015/ September-Oktober 2008.

²⁰ Amal Insanl, *Majalah Lazdai*, Edisi 015 September-Oktober 2008.

d. Program Pemberdayaan Zis

Proses selanjutnya adalah pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah tetapi sulit. Dalam hal ini, jika tidak hati-hati dalam mendistribusikannya maka mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya muzakki-muzakki baru yang berasal mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada zakat. karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahik, baik mustahik yang konsumtif maupun mustahik yang produktif. Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan asnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan mustahik tidak produktif adalah mustahik dari delapan asnaf terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif dapat dilakukan pemberdayaan-pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam konteks penyaluran dan pemberdayaan zakat LAZDAI Lampung melakukannya dengan melihat latar belakang aktifitas para mustahik. Misalnya seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan, modal dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan. Seorang pelajar yang miskin diberikan beasiswa disertai pemnibaan dan supervisi dan selanjutnya program tersebut dilakukan evaluasi dan pengawasan.

a. LAZDAI Spirit Centre

Adalah program pemberdayaan ZIS dalam bidang pendidikan jangka pendek khusus untuk anak-anak dhu'afa yatim/ putus sekolah agar semangat dan bangkit mandiri dengan program pendidikan life skill siap kerja (komputer IT) penuh motivasi dan percaya diri.

b. Pro Cermat (Program Cerdaskan Umta)

Adalah program penyaluran ZIS dalam bidang pendidikan berupa beasiswa sekolah yatim dan dhu'afa, taining pendidikan, dan peduli sekolah anak bangsa.

c. LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan)

Adalah program penyaluran ZIS berupa bedah rumah, santunan untuk mustahik, peduli kesehatan, salur tabur kurban, mobil layanan dhu'afa, unit bencana musibah, yatim by request, layanan terpadu umum.

d. LEKAT (Layanan Ekonomi Umat)

Adalah perogram penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang ekonomi dhu'afa berupa bantuan usaha rakyat kecil, bantuan modal sistem qordhul hasan, dan diklat ekonomi mandiri.

e. SEHAT (Sentra Dakwah Umat)

Adalah program penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang dakwah berupa wakaf qur'an, gelar sajadah masjid dhu'afa, santunan da'i, pemberdayaan da'i, sinergi dakwah, dan sosialisasi dakwah.²¹

e. Faktor Penghambat dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat.

LAZDAI dalam perjalanan sejarahnya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, antara lain adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk dapat memberdayakan zakat. Untuk memperoleh sumber daya manusia 'amil zakat yang profesional, mesti direncanakan sesuai dengan kebutuhan bidang kerjanya. Dalam hal ini, para profesionalis yang terampil dalam bidang kerna. Misalnya untuk mensosialisasikan zakat perlu orang yang terampil dalam hal penyuluhan, dalam hal pembukuan mestinya personal yang terampil dalam akutansi zakat. Demikian halnya pada bagian-bagian yang lainnya seperti pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan

²¹ LAZDAI CENTRE, The Company Profile, Tanpa Tahun.

zakat, semuanya dibutuhkan tenaga-tenaga yang sangat profesional dan kompeten dalam bidangnya.

Sementara dalam lembaga 'amil LAZDAI belum semua bidang diposisikan tenaga yang profesional secara keseluruhan, namun hanya beberapa orang yang terkait dengan tenaga komputer yang masih terbatas, jumlah tenaga ahli manajemen yang masih terbatas, tenaga akuntan, dan tenaga relawan sosialisasi zakat yang masih terbatas.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

LAZDAI dilihat dari sisi gedung perkantoran sebenarnya sudah cukup memadai. Karena LAZDAI sudah memiliki gedung sendiri yang sangat representatif untuk sebuah kantor. Namun demikian, perkantoran LAZDAI masih berpusat pada satu tempat, dan belum memiliki kantor-kantor perwakilan untuk di daerah-daerah tertentu. Selain itu, sarana yang terdapat diperkantoran masih belum lengkap untuk *memack-up* semua program-program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang kelancaran dalam pelaksanaannya.

Selain itu, LAZDAI belum memiliki kendaraan khusus yang dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Sehingga untuk menjangkau daerah-daerah yang relatif cukup jauh dan medan yang sangat sulit dilalui sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan jangkauan informasi dan wilayah kerja menjadi sangat terbatas hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja.

3. Pemahaman muzakki tentang zakat

Dalam pandangan ulama klasik, kewajiban melaksanakan zakat diarahkan ke berbagai segmen penghasilan tertentu, seperti: emas dan perak, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perdagangan, dan hasil temuan/ rikaz. Dan ini lah yang menjadi pemahaman masyarakat Islam pada umumnya. Sementara zakat yang memiliki potensi yang cukup signifikan masih belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban zakat, misalnya profesi atau jabatan tertentu yang sebenarnya ini bisa jadi jumlah muzakkinya lebih banyak dari pada jumlah muzakki yang memiliki beberapa usaha yang telah disebutkan di atas. Kondisi ini sangat berpengaruh pada tingkat jumlah muzakki yang mengeluarkan

zakatnya, karena dalam pandangan mereka tunjangan profesi tidak masuk pada dana yang wajib dikeluarkan zakatnya.

D. Penutup

Pada studi ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodakoh dikelola oleh LAZDAI baik dalam pengambilan, pengelolaan dan pendistribusian telah dilaksanakan secara profesional. Sehingga dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi juga diberdayakan sebagai dana modal usaha para mustahik, dana beasiswa, dana kesehatan, dana bantuan korban bencana, dan dana sosial lainnya.
2. LAZDAI sebagai suatu lembaga ‘amil yang profesional masih mengalami kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat antara lain: keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan sosialisasi dan informasi masih belum dapat terjangkau ke seluruh pelosok Lampung, keterbatasan Sarana dan pra sarana penunjang seperti kendaraan, sarana informasi yang masih terbatas, dan sarana perkantoran yang masih minim.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga keagamaan LAZDAI telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat masyarakat Lampung. Oleh karena itu, dapat juga dilakukan penelitian pada lembaga keagamaan yang lain, yang juga telah berkontribusi kepada umat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan Shodaqoh atau dana-dana yang lain untuk dijadikan sebagai sumber pendanaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam.
2. Pelayanan prima dan peningkatan profesionalisme pada lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di Lampung tentu saja tidak hanya dilakukan oleh LAZDAI, namun juga ada kemungkinan besar banyak dilakukan juga oleh lembaga keagamaan yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdi Zulkarnaen Sitepu, *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, dalam Jurnal “MENARA INTAN”, P2M IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 23 Nomor 2 Desember 2005.
- Amal Insani, MAJALAH LAZDAI, Edisi 015 September-Oktober 2008.
- Donald W. Litereel, *The Theori and Practice of Community Development. A Guide for Practitioners*, seperti disadur oleh M. Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktik Pengembangan Masyarakat*, Surabaya. Usaha Nasional, 1986.
- LAZDAI CENTRE, *The Company Profile*, Tanpa Tahun.
- LAZDAI Lampung, *Brosure Launching Penyaluran Beasiswa Pro Cermat*, Tanpa Tahun.
- Muhammad Thalhah Hasan, *Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Nanih Mahendrawati dan Agus Efendi, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, 2001.
- Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedjatmoko, *Sosial Energy as a Development Resource dalam David C. Korten (ed.)*, Community Management Asian.
- Soekandar Wiriaatmadja, *Pokok – Pokok Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: CV. Yasaguna).
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawal Persi, 1985).
- Supriyati Istiqomah, *Pemberdayaan Dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*, dalam Jurnal “KOMUNITAS”, Vol. 26 No. 1 Juni 2008.
- Taufiq Rohman Dhohiri, et. El., *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhitira, 2007).